

DINAMIKA DAKWAH DAN POLITIK DALAM PEMIKIRAN ISLAM MODERNIS DI INDONESIA

Oleh : Abdur Razzaq *)

Abstract :

Da'wah and politics have a very big role in the repair process ummah. This study aims to analyze the history by using a comparative approach whose goal is to assess, examine and compare the leaders of Islamic modernist thinking about dakwah and political role in the process of repair people. Almost agreed that the process of repair people need the right method in dealing with the problems of Muslims is so complex. Syumuliah principle in Islam is not only at the level of concepts and doctrine alone, but also in the level of implementation of political and dakwah must be emphasis as community improvement efforts. The combination of theory Top-Down and Buttom-Up as one of the repair process is applied to the appropriate community improvement efforts and thorough. Top-Down Theory through political channels is implemented by setting up the system, improved legislation, thus leading to the making of policies that support the implementation of Islamic laws and facilitate the implementation of dakwah as people repair process. Implementation of the dakwah of significant improvement over the system either through parliament to fight for the implementation of Islamic law, while the theory Buttom-Up in the mission is the process of preparing the people to accept the system that has been fought through politics, the process of awareness, training, and raising awareness about the importance of returning to the teachings of Islam as perfect religion. Meeting of the implementation of these two theories would generate a society that is ready to implement Islam as rahmatan lil 'aalamin.

Key Word : Dakwah, Political Propaganda and Modernist Islamic Thoungt.

Pendahuluan

Dakwah dan politik mempunyai kaitan yang kuat dalam Islam sebagai wasilah terhadap proses perbaikan umat. Tidak dinafikan bahwa untuk mengentaskan umat Islam dari sekian banyak permasalahannya yang begitu kompleks, perlu kepada penanganan yang tepat dan terorganisir dengan baik. Kehadiran Islam modernis di Indonesia memberikan warna tersendiri dalam perkembangan umat Islam. Pemikiran Islam modernis yang berusaha mengembalikan keadaan umat Islam kepada ajaran Islam yang sebenarnya dengan berlandaskan kepada al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW memberikan pencerahan terhadap umat Islam.

Prinsip *syumuliah* Islam sebagai agama agar menjadi *rahmatan lil 'alamin* dapat dilihat dari usaha untuk menyeimbangkan pemikiran antara kehidupan dunia dan akhirat. Disatu sisi Islam adalah agama samawi yang mempunyai misi dan visi keakheratan, tetapi pada saat yang sama tidak meninggalkan perannya sebagai agama yang juga bisa memberikan kontribusi bagi kehidupan duniawi. Kehadiran Islam modernis seolah ingin menjawab pertanyaan yang pernah dilontarkan oleh Tariq bin Ziyad mengawali era 'globalisasi' sejarah Islam abad pertengahan, "*Aina al-mafarr? Al-Bahru waraakum wa al-aduwwu amamakum*". (Ke mana kita akan lari menghindari dari persoalan yang nyata-nyata kita hadapi? Hamparan laut luas ada di belakang kita, sedang musuh dengan berbagai keahliannya ada di hadapan kita?). Kita sedang menghadapi permasalahan umat yang terjebak dalam kebodohan, kemiskinan, keterbelakangan dan pada saat yang sama tantangan perkembangan zaman sebagai konsekwensi dari kemajuan teknologi akan menggilas ketidaksiapan umat Islam dalam menghadapinya. Kajian ini penulis mulai dari pembahasan tentang sejarah dan pemikiran Islam modernis di Indonesia, yang selanjutnya dilanjutkan dengan pembahasan tentang dakwah dan politik dalam pandangan Islam modernis di Indonesia. Poin inti dari pembahasan ini adalah sinergi dakwah dan politik dalam proses perbaikan umat sebagai jawaban atas usaha menjawab kedua tantangan permasalahan umat Islam diatas.

Sejarah dan Kontekstualisasi Pemikiran Islam Modernis

Istilah Islam modernis seringkali digunakan sebagai kebalikan dari Islam tradisional. Walaupun tidak dapat diketahui secara pasti sejak kapan timbulnya istilah Islam tradisional dan Islam modernis, namun kenyataannya kondisi ini benar-benar ada pada umat Islam di Indonesia. A.M. Saefudin menganalisa bahwa dikotomi atau pemisahan modernis-tradisionalis Islam di Indonesia dikembangkan oleh Zionisme Internasional sebagai salah satu fitnah memecah belah dan melemahkan keadaan umat Islam di Indonesia. Kata modernis yang berada di belakang kata Islam, berasal dari bahasa inggris *modernistic* yang berarti model baru. Selanjutnya dalam *kamus umum bahasa Indonesia*, kata modern diartikan sebagai yang terbaru (se) cara baru, mutakhir. Selanjutnya kata modern erat pula kaitannya dengan kata *modernisasi* yang berarti pembaharuan atau *tajdid* dalam bahasa Arabnya. Dalam masyarakat barat modernisasi mengandung arti pikiran, aliran, gerakan dan usaha untuk mengubah paham-paham, adat-istiadat, institusi-institusi lama, dan sebagainya untuk disesuaikan dengan suasana baru yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern.

Dalam Islam modernisasi berarti upaya yang sungguh-sungguh untuk melakukan re-interpretasi terhadap pemahaman, pemikiran dan pendapat tentang masalah ke-Islaman yang dilakukan oleh pemikiran terdahulu untuk disesuaikan dengan perkembangan zaman. Dengan demikian yang diperbaharui adalah hasil pemikiran atau pendapat dan bukan memperbaharui atau mengubah apa yang terdapat dalam al-Qur'an maupun al-Hadits. Yang diubah atau diperbaharui adalah hasil pemahaman terhadap al-Qur'an dan al-Hadits tersebut. Islam modernis timbul sebagai respon terhadap berbagai keterbelakangan yang dialami oleh umat Islam, seperti

keterbelakangan dalam bidang ekonomi, pendidikan, ilmu pengetahuan, kebudayaan, politik dan lain sebagainya. Keadaan seperti ini dinilai tidak sejalan dengan Islam sebagaimana terdapat dalam al-Qur'an dan al-Sunnah. Dalam kedua sumber ajaran tersebut, Islam digambarkan sebagai agama yang membawa kepada kemajuan dalam segala bidang, untuk tercipta kemaslahatan umat. Islam sebagai agama yang mencintai kedamaian juga agama yang menganjurkan kemajuan.

Sifat *syumuliah* dalam Islam adalah salah satunya diartikan dengan seimbang antara kehidupan dunia dan akhirat. Namun dalam kenyataannya umat Islam tidak memperlihatkan sikapnya yang sejalan dengan al-Qur'an dan al-Sunnah itu. Jika demikian adanya, maka diduga terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam memahami al-Qur'an dan al-Sunnah tersebut, serta adanya faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kekeliruan tersebut. Berangkat dari kesadaran akan lemahnya kondisi umat Islam dalam berbagai bidang, bermunculanlah gagasan modernisme Islam yang menemukan momentumnya sejak awal abad 20. Dalam bidang pendidikan direalisasikan dengan mendirikan lembaga-lembaga pendidikan modern yang diprakarsai oleh organisasi-organisasi modernis Islam seperti Jami'at al-Khoir, Al-Irsyad, Muhammadiyah dan lain-lain.

Walaupun pada awalnya upaya modernisasi dimulai dari bidang pendidikan, namun secara tidak terbendung kemudian mempengaruhi umat Islam dalam bidang pemikiran. Dari kenyataan ini, poin penting yang harus disampaikan bahwa kehadiran pemikiran Islam modernis di Indonesia adalah berangkat dari keinginan memperbaiki keadaan umat Islam yang berada dalam keadaan yang tidak menguntungkan. Bisa dikatakan umat Islam Indonesia besar secara kuantitas tetapi kecil secara kualitas. Latar belakang timbulnya Islam modernis adalah sebagai respon kepedulian terhadap upaya mengatasi berbagai keterbelakangan umat Islam. Upaya tersebut dilakukan dengan terlebih dahulu mencari sebab-sebab kemunduran dan keterbelakangan tersebut, seperti karena meninggalkan al-Qur'an dan al-Sunnah, lemahnya persaudaraan, pertikaian politik, sikap pasrah atau jumud serta karena mengikuti bid'ah, khurafat dan takhayul. Untuk kemudian berusaha mengembalikan keadaan umat Islam kepada pemahaman yang sebenarnya tentang menjadikan al-Qur'an dan Sunnah sebagai sumber rujukan utama dalam hidupnya. Ada dua pembahasan yang dapat menulis ungkapkan sebagai penekanan pemikiran Islam Modernis, yaitu reformasi pemikiran dan kebebasan berpendapat.

Reformasi dalam Islam identik dengan istilah *ishlah* yang secara bahasa berasal dari kata *ashlaha-yushlihu-ishlaah* yang berarti lawan dari kata rusak/fasad dan juga Al-Raaghib al-Isfahani. *Ishlah* berarti memperbaiki dan menyempurnakan sesuatu yang belum sempurna, termasuk mengganti yang usang dan rusak. Istilah *ishlah* digunakan beberapa kali dalam al-Qur'an seperti dalam surah al-Baqarah, surah an-Nisa', 4: 114, 2: 220, surah Hud 11: 88, surah al-A'raf, 7: 56 dan 85. Poin penting yang bisa diambil dari konsep al-Qur'an adalah, *ishlah* selalu berkaitan dengan konsep *amar ma'ruf*, *jihad* dan *tajdid* sebagai bentuk implimentasi reformasi pemikiran. Reformasi pemikiran dalam konteks pemikiran Islam modernis bukanlah bermakna mengubah Islam, namun merupakan gerakan untuk kembali kepada Islam kepada pesan-pesan aslinya, dengan lebih menekankan aspek teologi dalam kesatuan. Pendapat inilah yang penulis ambil dengan tanpa mengurangi rasa

hormat terhadap perbedaan pendapat yang tidak sejalan, sepanjang tidak menyimpang dari ketentuan *syara'*.

Selanjutnya makna pembaharuan yang juga disampaikan dalam pemikiran Islam modernis adalah kebebasan berpendapat (*hurriyyah ar-ra'iy*). Sebagian orang berpendapat bahwa Islam sebagai agama wahyu, tidak terdapat banyak ruang menyampaikan pendapat dalam masalah agama. Stigma yang terbentuk dalam sebagian masyarakat Islam dewasa ini adalah jika ada sedikit ruang untuk bebas berpendapat, maka ruang itu hanya dimiliki segelintir manusia yang bergelar ulama. Stigma yang salah inilah yang kemudian menjadi pemikiran Islam modernis untuk memperbaikinya. Karena prinsip reformasi pemikiran dalam Islam salah satunya adalah bermakna memperbaiki atau menyempurnakan, maka konsep *amar ma'ruf nahy munkar* merupakan bentuk implementasi dari perbaikan dan penyempurnaan itu sendiri. Prinsip ini melingkupi semua aspek yang diajarkan di dalam al-Qur'an yaitu menjaga hubungan antar sesama manusia dan dengan Allah sebagai pencipta. Prinsip inilah yang juga mempertemukan antara konsep reformasi dalam pemikiran Islam modernis dengan kebebasan berpendapat dalam Islam. Pemikiran ini bisa dilihat dari konsep yang pernah disampaikan tokoh Islam modernis Ahmad Dahlan yang menyatakan bahwa ijtihad sebagai upaya memahami Islam dari sumber primer (al Quran dan sunnah) merupakan proses tidak pernah selesai.

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan secara garis besar pemikiran Islam modernis yang membawa misi secara serempak tentang perlunya *tajdid* dalam substansinya yg paling dalam adalah kembali pada Al-Qur'an dan As-Sunnah serta memerangi segala bentuk syirik bid'ah, khurafat dan takhyul. Namun demikian yang diperbaharui adalah hasil pemikiran atau pendapat dan bukan memperbaharui atau mengubah apa yang terdapat dalam al-Qur'an maupun al-Hadits. Yang diubah atau diperbaharui adalah hasil pemahaman terhadap al-Qur'an dan al-Hadits tersebut. Dalam bahasa yang mudah pembaharuan adalah berarti memperbaharui pemahaman (Islam) dengan kembali kepada keaslian Islam dan bukan membuat atau membawa sesuatu yang baru.

Dakwah dan Politik Dalam Pemikiran Islam Modernis

Secara umum tidak ada perbedaan antara ulama tentang makna dan pentingnya dakwah bagi umat Islam. Dakwah merupakan kewajiban bagi muslim dan muslimah pada setiap masa dan keadaan. M. Natsir sebagai tokoh Islam modernis dalam buku monumentalnya *Fiqhud Da'wah*, menyatakan bahwa dakwah dalam arti luas, adalah kewajiban yang harus dipikul oleh tiap-tiap muslim dan muslimah. Tidak boleh seorang muslim dan muslimah menghindarkan diri darinya. Tentang konsep dakwah ini beliau mengutip beberapa ayat al-Qur'an sebagai panduan yang menguatkan tentang hukum kewajiban berdakwah bagi setiap muslim dan muslimah antara lain QS. Ali 'Imran 3: 110, QS. Al-Nashr 103: 1-3) Mengenai tujuan dakwah, beliau menulis (1989) yang menyatakan bahwa tujuan dakwah adalah: Memanggil kita kepada syariat, untuk memecahkan persoalan hidup, baik persoalan hidup perseorangan atau persoalan berumah tangga, berjemaah-bermasyarakat, bersuku bangsa, bernegara, berantarnegara. Memanggil kita kepada fungsi hidup kita sebagai hamba Allah di atas dunia

yang terbentang luas ini, berisikan manusia berbagai jenis, bermacam pola pendirian dan kepercayaannya, yakni fungsi sebagai *syuhada' ala al-nas*, menjadi pelopor dan pengawas bagi ummat manusia. Memanggil kita kepada tujuan hidup kita yang hakiki, yaitu menyembah Allah. Konsep pemikiran ini tidak jauh berbeda dengan yang pernah diungkapkan Hamka mengatakan bahawa dakwah merupakan soal penting dalam Islam karena berfungsi untuk mengawal tegaknya *al amr bi al-ma'ruf wa an nahy an al-munkar*. Selain itu, aktivitas dakwah dapat menggerakkan semangat beragama masyarakat Islam. Agama Islam akan menjadi hidup di tengah-tengah umat ketika Islam dapat dipahami dengan baik oleh masyarakatnya. Pemahaman terhadap agama Islam sebagai kebenaran yang datang dari Allah s.w.t. antara lain melalui aktivitas dakwah. Selanjutnya menurut beliau kehidupan Muslim akan bermakna dalam pandangan Allah s.w.t. apabila diisi dengan aktivitas dakwah.

Hamka menyebutkan bahawa dakwah harus menjadi gerakan yang hidup dalam masyarakat muslim. Al-Quran telah mempertegas bahawa dalam keadaan perang sekalipun perlu ada kelompok yang belajar agama secara sungguh-sungguh. Kemudian mereka diberikan tugas untuk berdakwah, iaitu mendakwahkan kelompok tentara ketika mereka kembali dari peperangan. Ini hanya satu contoh yang baik sekali dikemukakan oleh al-Quran. Dalil inilah menurut Hamka bahawa pendakwah itu adalah orang-orang yang harus profesional. Lebih tegas beliau mengatakan: Kalau sudah jelas agama Islam adalah agama untuk manusia seluruhnya, tidak membedakan bangsa atau warna kulit, suatu agama yang kekal mereka menyeru generasi demi generasi, niscaya jelaslah bahawa Islam memerlukan ahli dakwah yang terampil dan dakwah yang tidak boleh terhenti. Dakwah harus berjalan terus, dan selalu diperbaharui. Ahli dakwah pun mesti gigih dan harus selalu memperbaiki diri menghadapi perubahan-perubahan yang ada dalam masyarakat.

Selanjutnya pemikir Islam modernis yang juga perlu dikaji tentang konsep dakwahnya adalah Ahmad Dahlan. Konsep dakwah Ahmad Dahlan bisa dilihat dari tulisan Mulkhan yang menyatakan bahawa gagasan dasar Ahmad Dahlan terletak pada kesejajaran kebenaran tafsir al-Quran, akal suci, temuan iptek, dan pengalaman universal kemanusiaan. Belajar filsafat baginya adalah kunci pengembangan kemampuan akal suci, selain belajar pada pengalaman beragam bangsa dan pemeluk agama. Dari sini diperoleh pengetahuan tentang bagaimana mencapai tujuan penerapan ajaran Islam, yaitu penyelamatan kehidupan umat manusia di dunia berdasarkan cinta kasih. Pemikiran ketiga tokoh Islam modernis ini memandang penting dakwah sebagai wasilah terhadap pembangunan umat Islam. Prinsip *syumuliah* Islam sebagai agama yang lengkap telah mempertemukan ketiganya dalam pemahaman yang sama, bahawa dakwah adalah kewajiban bagi umat Islam untuk tegaknya agama Allah di muka bumi.

Mengenai konsep politik Islam M. Natsir memandang bahawa Politik dalam Islam adalah suatu keharusan. Konsep-konsep politiknya yang mula-mula diungkapkan pada awal 1930, memperlihatkan ciri-ciri pemikiran Islam modernis di Indonesia. Misi politik Islam yang diperjuangkannya adalah menentang berbagai aliran pemikiran yang berusaha untuk merusak Islam baik dari kaum orientalis Belanda, maupun pemikiran tokoh-tokoh nasionalis yang mengarah kepada pemikiran sekuler. M. Natsir berusaha menjelaskan

tentang hakikat politik dalam Islam. Bahwa Islam bukanlah sebatas ibadah *mahdhah* saja. Beliau menyatakan dalam sebuah wawancara M. Natsir : “Banyak sekali masalah kontemporer yang dihadapi Islam sebagai kelanjutan dari proses yang telah berlangsung sebelumnya, terutama masalah-masalah yang berlanjut setelah konstituante. Perlu diketahui bahawa Islam adalah agama mayoritas penduduk di negara kita, tetapi banyak sekali umat Islam yang belum memahami Islam, atau yang memahami Islam dari sudut pandang lain yang dipengaruhi oleh konsep-konsep Barat. Dalam konteks pemahaman yang sering dilukiskan sebagai kehidupan duniawi dan kehidupan spiritual misalnya, Islam tidak mengenal dikotomi ini. Islam memandang kehidupan manusiawi di dunia ini secara komprehensif, tidak ada pemisahan kehidupan, termasuk dalam hubungan antara orang sebagai pribadi, sebagai warga masyarakat dan sebagai warga negara”

Dalam ungkapan yang lebih spesifik lagi mengenai kaitan politik dengan Islam, M. Natsir menyatakan, “Sebagai seorang muslim, kita tidak boleh melepaskan diri dari politik. Sebagai seorang politik, kita tidak bisa melepaskan diri dari ideologi kita, iaitu ideologi Islam. Bagi kita, menegakkan Islam itu tidak bisa dilepaskan dari menegakkan masyarakat, menegakkan negara dan menegakkan kemerdekaan. ”Pemikirannya ini semakin menegaskan tentang prinsip syumuliah dalam Islam yang meletakkan pemahaman tidak adanya pemisahan antara konsep agama dengan politik ataupun pemisahan antara kehidupan dunia dan akhirat.

Kaitan dakwah dan politik dalam konteks pemikiran Hamka yang dikelompokkan oleh Syafi'i Ma'arif sebagai tokoh modernis dan neo-modernis, meletakkan syarat seorang da'i harus memahami ilmu politik karena pendekatan dakwah harus disesuaikan dengan keadaan politik suatu negara. Dalam hal ini lebih jauh Amien Rais menganalisa bahwa politik merupakan bagian dari dakwah bahkan politik merupakan alat dakwah. Karena politik adalah alat dakwah, maka aturan permainan yang mesti ditaati juga harus seiring dengan aturan permainan dakwah...keterbukaan, kejujuran, rasa tanggung jawab serta keberanian menyatakan benar sebagai benar dan yang batil sebagai batil, harus menjadi ciri-ciri politik yang berfungsi sebagai sarana dakwah.

Dakwah dan Politik Dalam Proses Perbaikan Umat

Dakwah dan politik adalah dua bagian penting yang tidak bisa dipisahkan dalam usaha perbaikan umat. Sinergi yang baik antara keduanya adalah keniscayaan solusi bagi setiap usaha memperbaiki keadaan umat Islam. Kalau dakwah mempunyai peran proses perbaikan pemahaman baik dalam bentuk ta'lim, tarbiyah, tabligh dan banyak lagi sebagai bentuk penyadaran untuk mengembalikan keadaan umat Islam terhadap tugas dan tanggung jawabnya sebagai khalifah Allah dimuka bumi. Sedangkan politik mempunyai peran sebagai perbaikan umat dari sistem dan undang-undang yang dilaksanakan oleh pemerintahan yang sadar dan mengerti tentang peran pentingnya sebagai penegak hukum-hukum Allah di muka bumi.

Secara teori konsep perbaikan umat melalui dakwah pada masyarakat sebagai penyadaran dapat dianalogikan dengan teori bottom-up yang secara literal, **bottom-up** berarti dari bawah ke atas. Implementasi dari konsep ini adalah proses perbaikan masyarakat dengan memperbaiki

pemahaman dan kesadarannya untuk menjadi umat yang lebih baik. Alasan inilah yang kemudian K.H. Ahmad Dahlan berpendapat bahwa pembentukan kepribadian sebagai target penting dari tujuan-tujuan pendidikan. Ia berpendapat bahwa tak seorangpun dapat mencapai kebesaran di dunia ini dan di akhirat kecuali mereka yang memiliki kepribadian yang baik. Seorang yang berkepribadian yang baik adalah orang yang mengamalkan ajaran-ajaran Al-Qur'an dan Hadis. Karena Nabi merupakan contoh pengamalan Al-Qur'an dan Hadis, maka dalam proses pembentukan kepribadian siswa harus diperkenalkan pada kehidupan dan ajaran-ajaran Nabi saw. Pendapatnya ini menguatkan konsep perbaikan umat melalui perbaikan masyarakat melalui dakwah dan pendidikan yang baik. Demikian juga dengan Hamka yang mengatakan bahwa dakwah merupakan soal penting dalam Islam karena berfungsi untuk mengawal tegaknya *al amr bi al-ma'ruf wa an nahy an al-munkar*. Selain itu, aktivitas dakwah dapat menggerakkan semangat beragama masyarakat Islam. Agama Islam akan menjadi hidup di tengah-tengah umat ketika Islam dapat dipahami dengan baik oleh masyarakatnya. Pemahaman terhadap agama Islam sebagai kebenaran yang datangnya dari Allah SWT antara lain melalui aktivitas dakwah.

Kaitan dakwah dan politik dalam konteks pemikiran Hamka yang dikelompokkan oleh Syafi'i Ma'arif sebagai tokoh modernis dan neo-modernis, meletakkan syarat seorang da'i harus memahami ilmu politik karena pendekatan dakwah harus disesuaikan dengan keadaan politik suatu negara. Dalam hal ini lebih jauh Amien Rais menganalisa bahwa politik merupakan bagian dari dakwah bahkan politik merupakan alat dakwah. Karena politik adalah alat dakwah, maka aturan permainan yang mesti ditaati juga harus seiring dengan aturan permainan dakwah...keterbukaan, kejujuran, rasa tanggung jawab serta keberanian menyatakan benar sebagai benar dan yang batil sebagai batil, harus menjadi ciri-ciri politik yang berfungsi sebagai sarana dakwah. Disinilah mempertemukan adanya sinergi antara teori *bottom-up* yang meletakkan dakwah sebagai proses perbaikan umat melalui bawah dengan teori *top-down* dengan melibatkan peran politik sebagai perbaikan umat dari atas. Peran politik sebagai perbaikan umat dari atas adalah dengan meletakkan hukum atau undang-undang yang sesuai dengan syari'at Islam, memperbaiki sistem yang ada sesuai dengan ketentuan syara' dan reformasi birokrasi sesuai dengan aturan Islam, adalah bentuk-bentuk peran politik dalam perbaikan umat. M. Natsir adalah tokoh Islam modernis yang menyadari betul konsep ini. Beliau menyatakan, "Negara bagi kita bukan tujuan, tetapi alat. Urusan kenegaraan pada intinya dan pada dasarnya adalah satu bagian yang tidak bisa dipisahkan, satu *'intergreerend deel'* dari Islam. Yang menjadi tujuan ialah kesempurnaan berlakunya undang-undang Ilahi, baik yang berkaitan dengan perikehidupan manusia sendiri (sebagai individu), ataupun sebagai anggota masyarakat. Baik yang berkaitan dengan kehidupan dunia yang fana ini, ataupun yang berkaitan dengan kehidupan kelak di alam baka". Pemahaman seperti inilah yang kemudian secara konsisten diperjuangkan oleh M. Natsir selama terjun langsung di dunia politik melalui Masyumi. Melalui Masyumi M. Natsir memperjuangkan sistem politik Islam dengan mengusulkan agar menjadikan Islam sebagai dasar negara. Dalam tulisannya beliau menyatakan, "Untuk menjaga supaya aturan-aturan dan ketetapan-ketetapan itu dapat berlaku dan berjalan sebagaimana mestinya,

perlu dan tidak bisa tidak, harus ada suatu kekuatan dalam pergaulan hidup berupa kekuasaan dalam negara, sebagaimana telah diperingatkan oleh Rasulullah SAW kepada kaum Muslimin, 'Sesungguhnya Allah memegang dengan kekuasaan penguasa, yang tidak dapat dipelihara dan dipegang oleh Al-Qur'an itu' (H.R. Ibnu Katsir)". Bentuk perjuangan politik praktis adalah, M. Natsir memimpin Masyumi sebagai ketua umum sejak 1949 sampai 1958, dua tahun sebelum dibubarkan. Sembilan tahun, M. Natsir memainkan peranannya dalam Masyumi sebagai partai terbesar dalam percaturan politik di Indonesia. Sebagai pemimpin politik Islam, M. Natsir secara maksimal telah memberikan seluruh tenaga dan buah pemikirannya bagi kepentingan ummat Islam di Indonesia dan seluruh bangsa Indonesia. Hal tersebut secara sederhana dapat dibuktikan melalui apa yang disebut 'Mosi Integral M. Natsir.

Penutup

Pemikiran Islam modernis membawa misi secara serempak tentang perlunya *tajdid* dalam substansinya yang paling dalam adalah kembali pada Al-Qur'an dan As-Sunnah serta memerangi segala bentuk syirik bid'ah, khurafat dan takhyul. Namun demikian yang diperbaharui adalah hasil pemikiran atau pendapat dan bukan memperbaharui atau mengubah apa yang terdapat dalam al-Qur'an maupun al-Hadits. Dalam bahasa yang mudah pembaharuan yang dibawa oleh Islam modernis adalah berarti memperbaharui pemahaman (Islam) dengan kembali kepada keaslian Islam berlandaskan al-Qur'an dan sunnah dan bukan membuat atau membawa sesuatu yang baru.

Baik M. Natsir, KH. Ahmad Dahlan maupun Hamka mempunyai kesamaan pemikiran tentang peran penting dakwah dan politik bagi proses perbaikan umat Islam. Adanya sinergi yang tepat dan terarah akan benar-benar memberikan peran yang besar dalam usaha memperbaiki keadaan umat Islam. Dakwah mempunyai peran perbaikan umat melalui proses penyadaran masyarakat untuk kembali kepada kebenaran dan keagungan ajaran Islam sehingga menjadi masyarakat yang lebih baik. Sedangkan peran politik adalah proses perbaikan dari atas dengan melakukan reformasi birokrasi, perbaikan sistem dan undang-undang yang menunjukkan keberpihakan terhadap terlaksananya hukum-hukum Islam. Memperjuangkan syariat Islam melalui politik adalah dengan melakukan reformasi undang-undang dari sistem jahiliyah kepada undang-undang yang berdasarkan syariat atau hukum-hukum Islam yang semuanya juga tidak akan terlaksana tanpa memperbaiki pemahaman para pembuat undang-undang itu sendiri dengan melalui dakwah.

Referensi

- Abdul Munir Mulkhan. (1990). *Pemikiran Kyai Ahmad Dahlan dan Muhammadiyah; dalam perspektif perubahan sosial*, Cet.I, Jakarta: Bumi Aksara.
- Abdul Munir Mulkhan. (2005). *Etika Welas Asih dan Reformasi Sosial Budaya Kiai Ahmad Dahlan*, (Artikel publikasi: Kompas, Sabtu, 01 Oktober 2005).
- Al-Raaghib al-Isfahani. (t. Th). *Mufradaat Alfaadz al-Qur'an*, (Beirut: Daar al-Fikr).
- Amien Rais. (1991). *Cakrawala Islam*. Bandung: Mizan.
- A.M. Saifuddin. (1991). *Pembaharuan Pemikiran Islam di Indonesia*. Bandung: Mizan.
- As'ad Abu Khalil. (1995). 'Islaah' dalam John L. Esposito (ed) *The Oxford Encyclopedia of The Modern Islamic World*, (New York: Oxford University Press).
- A . Zaki Badawi. (1993). *A Dictionary of Social Sciences*, (Beirut: Librairie Du Liban).
- Edy Yusuf Nursamsu Santosa, Kontekstualisasi Pembaharuan Pendidikan Islam Akhmad Khan di India. Diakses 11 Juli 2010,
http://uin-suka.info/ejurnal/index.php?option=com_content&task=view&id=81&Itemid=52
- Hamka. (1984). *Prinsip Dan Kebijakan Dakwah Islam*. Jakarta: Pustaka Panjimas.
- Louis Ma'luf. (1986). *Al-Munjid fii al-Lughah wa al-A'lam*, (Beirut: Daar al-Masyruq).
- M. Natsir (1954), *Capita Selecta*, J. 1. Jakarta: Bulan Bintang.
- M. Natsir (1958), *Agama dan Politik Capita Selecta*, J. 2, Jakarta: Pustaka Pendis.
- M. Natsir (1989), *Politik Melalui Jalur Dakwah*, Jakarta: PT Abadi.
- M. Natsir (2000), *Islam Sebagai Dasar Negara*. Jakarta: Media Dakwah.
- Said Agil Sirajd. (1999). *Islam Kebangsaan: Fiqh Demokratik Kaum Santri* (Jakarta: Fatma Press).
- Syafi'i Ma'arif. (1995). *Peta Bumi Intelektual Muslim di Indonesia*. Bandung: Mizan.
- Suja, H. (1989). *Muhammadiyah dan Pendorongnya*. Yogyakarta: Majelis Pustaka.